

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026



*Pemerintahan Kabupaten
Sidoarjo*

Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya Penyusunan *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026* dapat terselesaikan. Secara umum, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memuat isu strategis, khususnya dalam pembangunan bidang sosial di Kabupaten Sidoarjo. Melalui dokumen Renstra ini, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi dan sasaran strategi yang ingin dicapai selama periode tahun 2021-2026.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, data-data maupun informasi yang berkaitan dengan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini.

Sidoarjo, Agustus 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO**



Dr. TIRTO ADI, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196605111998021003

Daftar Isi

Sampul Depan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	
.....	
I-1	
1.2 Landasan Hukum	
.....	
I-3	
1.3 Maksud Dan Tujuan	
.....	
I-8	
1.4 Sistematika Penulisan	
.....	
I-9	
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat	
 Daerah	
.....	
 II-1	
2.1 Tugas, Fungsi Dan Stuktur Organisasi Dinas Sosial	
Kabupaten Sidoarjo	
.....	

	II-1	
2.2	Sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
	II-14	
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
	II-17	
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
	II-24	
2.4.1	Tantangan
	II-24	
2.4.2	Peluang
	II-25	
Bab III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
	III-1	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayana Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
	III-1	
3.2	Telaah Visi, Misi Serta Program Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo Terpilih
	III-3	
3.3	Telaah Renstra K/L Dan Renstra Dinas Sosial

	III-8
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-11
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis..... III-11
Bab IV	Tujuan Dan Sasaran
	IV-1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo IV-1
Bab V	Strategi Dan Arah Kebijakan
	V-1
5.1	Strategi Dan Kebijakan
Bab VI	Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan
	VI-1
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	VII-1
Bab VIII	Penutup
	VIII-1

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra yang berpijak pada RPJMD

.....

I-2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

.....

II-2

Gambar 2.2 Rencana SOTK Baru Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

.....

II-13

Gambar 2.3 Infografi Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

.....

II-15

Gambar 4.1 Konsep Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra

.....

IV-2

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sarana Dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 II-16
Tabel 2.2	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo II-18
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 II-23
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo III-2
Tabel 3.2	Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo III-3
Tabel 3.3	Keterkaitan Visi Dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 III-5
Tabel 3.4	Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-6
Tabel 3.5	Telaah Rencana Strategis Kementerian Sosial

	
	III-9	
Tabel 3.6	Telaah Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur...	III-10
Tabel 3.7	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	III-12
Tabel 3.8	Nilai Skor Kriteria Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	III-12
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	
	
	IV-3	
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	
	
	V-1	
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Tahun 2022-2026	
	
	VI-2	
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mangacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	
	
	VII-1	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional adalah isu tentang kesejahteraan sosial. Penanganan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab utama negara melalui pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itu merupakan amanat konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 C dan 34. Selain itu, sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang dilihat dari situasi kesejahteraan sosial warganya. Dengan demikian, kesejahteraan sosial akan selalu menjadi arus utama dinamika pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang urusan di bidang sosial maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyusun dokumen perencanaan yang nantinya akan mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial serta menjadi tolok ukur evaluasi capaian kinerja. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah dengan periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam kurun waktu 2021-2026, dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam Menyusun Renstra mengacu pada **Visi Bupati** yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan***". Serta mengacu pada **misi ke-2** yaitu "Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan".

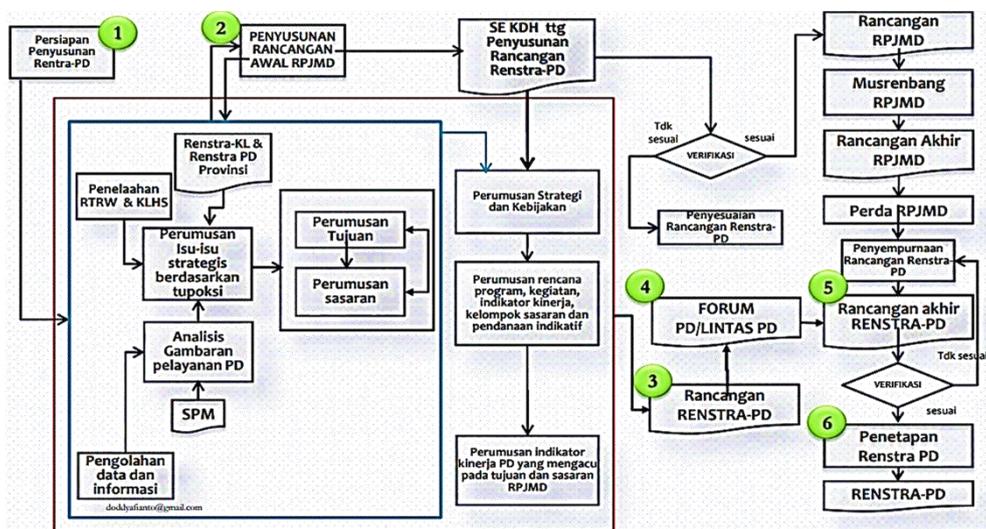
Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

2021–2026 merupakan landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimandatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di bidang sosial. Renstra Dinas Sosial ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rencana Kerja merupakan perencanaan tahunan yang menjadi dasar Dinas Sosial dalam Menyusun Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pengisian Anggaran (DPA).

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra yang berpijak pada RPJMD



Keterkaitan Renstra Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Sidoarjo, Renstra Kementerian Sosial, maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam bentuk penyelarasan kebijakan dan target pembangunan di Bidang Sosial. Penurunan penduduk miskin akan dicapai melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, dan program perlindungan dan jaminan sosial. Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial dalam kurun waktu 2021-2026, sehingga target capaian Renstra diakhir periode perencanaan dapat terealisasi dengan baik. Ketercapaian target pembangunan bidang sosial tersebut diharapkan dapat berkontribusi besar dalam pencapaian misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyandang Cacat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Membagi Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1963 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1963 tentang Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi,
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
32. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Anak;
33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
37. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 38. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C).
47. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 73).
48. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Renstra menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran pada Dinas Sosial serta para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Urusan Sosial tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Permasalahan dan Isu Strategis di lingkup Urusan Sosial yang mencerminkan lingkup kerja yang akan ditangani selama periode Renstra.
- b. Menentukan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, yang diselaraskan dengan indikator puncak berdasarkan urusan yang diampu dan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.
- c. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial berdasarkan Tujuan dan Sasaran jangka menengahnya, yang dikaitkan dengan Strategi dan Arah Kebijakan pada urusan social dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026.
- d. Menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan nomenklatur yang telah diatur dalam peraturan dan merumuskan indikator serta target kinerja.
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- f. Sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

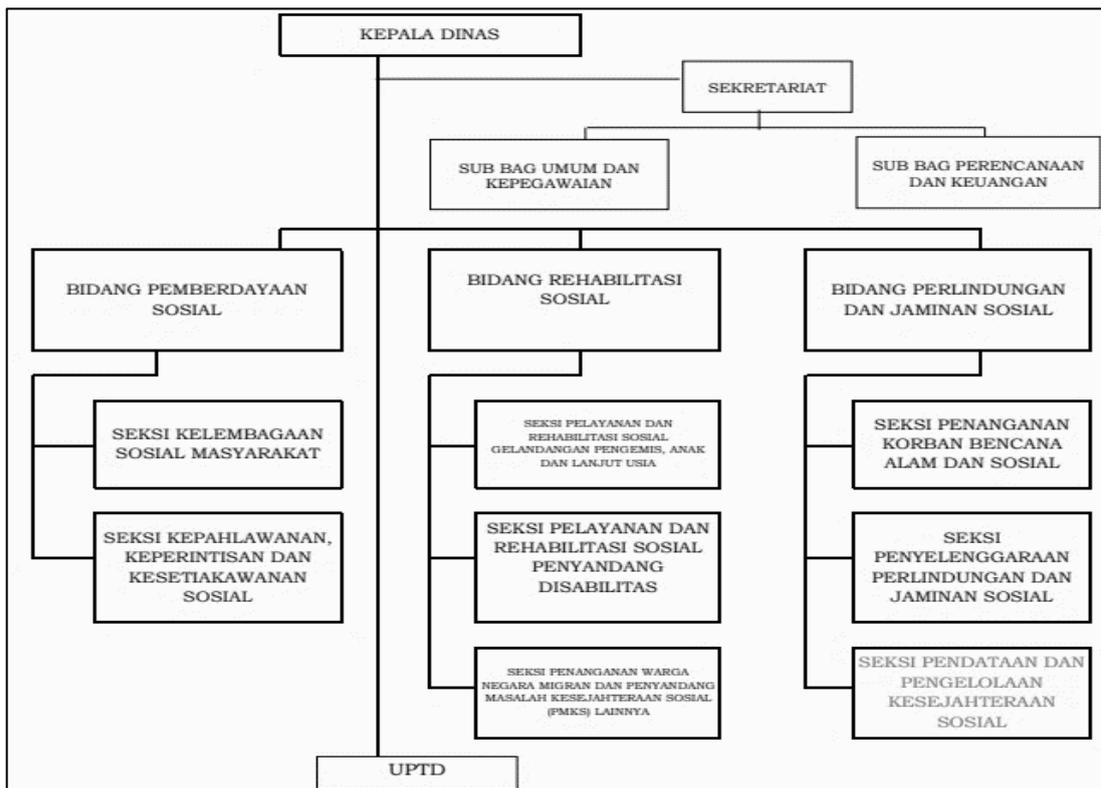
BAB VIII – PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo**

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Sosial perlu melakukan penyesuaian struktur guna mengakomodir adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Pada proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu: 1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang sosial yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- e. Pelaporan kinerja dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindaklanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun

tidak langsung;

- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

❖ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja dinas;
- b. mengoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
- e. menyusun laporan kinerja dinas;
- f. melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
- i. melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran;
- j. menyusun laporan pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.1.3 Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemberdayaan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis

- pemberdayaan sosial;
- d. pelaporan kinerja bidang pemberdayaan sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat**

Kepala Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis kelembagaan sosial masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan sosial masyarakat, meliputi:
 - 1. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - 2. pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - 3. pelaksanaan pemantauan, perizinan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/ pengelolaan sumber dana sosial;
 - 4. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
 - 5. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan.
- c. menyusun dan memperbaharui data kelembagaan sosial masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis

kelembagaan sosial masyarakat;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial**

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, meliputi:
 - 1. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - 2. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
 - 3. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - 4. Koordinasi kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, Guru/masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dan restorasi sosial;
- c. menyusun dan memperbaharui data kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.4 Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- d. pelaporan kinerja bidang rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis, Anak dan Lanjut Usia

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis, Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan pengemis, anak dan lanjut usia;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan pengemis, anak dan lanjut usia, meliputi:
 1. pelaksanaan bimbingan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak , balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak;
 2. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak, , balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak;
- c. menyusun dan memperbaharui data pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan pengemis, anak dan lanjut usia;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan pengemis, anak dan lanjut usia;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, meliputi: Disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan orang dengan gangguan jiwa, bekas penyakit kronis;
- c. menyusun dan memperbaharui data pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Penanganan Warga Negara Migran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

Kepala Penanganan Warga Negara Migran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis penanganan warga negara migran dan penyandang masalah dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis penanganan warga negara migran dan penyandang masalah dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

- (PMKS) lainnya, meliputi: gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks. Tuna susila;
- c. menyusun dan memperbaharui data penanganan warga negara migran dan penyandang masalah dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penanganan warga negara migran dan penyandang masalah dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.5 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaporan kinerja bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, meliputi:
 1. kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana korban bencana alam dan sosial;
 2. kegiatan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial warga negara bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 3. identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan, perlindungan sosial dan intervensi psikososial;
- c. menyusun dan memperbaharui data Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, meliputi:
 1. penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang

- tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan;
2. bimbingan teknis penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan;
 - c. menyusun dan memperbaharui data penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ **Seksi Pendataan dan Pengelolaan Kesejahteraan Sosial**

Seksi Pendataan dan Pengelolaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun perumusan kebijakan teknis pendataan dan pengelolaan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pendataan dan pengelolaan kesejahteraan sosial;
- c. menyusun dan memperbaharui data pendataan dan pengelolaan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pendataan dan pengelolaan kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan. Pembinaan, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Sumber daya manusia (SDM) merupakan tenaga yang tersedia untuk menyokong dan melaksanakan tugas-tugas SKPD yang termuat dalam tupoksi demi mewujudkan visi dan misi SKPD. Kualitas dan kuantitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja SKPD yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu SDM dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo selaku pelaksana urusan wajib bidang sosial berjumlah 34 orang dengan komposisi 17 orang perempuan dan 17 orang laki-laki. Data informasi terkait sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam infografis berikut ini:

Gambar 2.3 Infografi Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa proposi SDM di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sudah ideal. Jumlah staff sebanyak 20 apabila dibagi dengan jumlah eselon IV, setiap eselon IV memiliki dua orang staff untuk membantuk pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya. Sementara itu, jenjang usia SDM Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagian besar berada pada usia 50-60 tahun. Tercatat sebanyak 12 orang (35,29%) pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berada pada rentang usia 50-55 dan 10 orang (29,41%) berada pada rentang usia 55-60 tahun.

Memperhatikan jumlah SDM yang cukup banyak dengan komposisi yang cukup beragam, maka seluruh pegawai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian diharapkan beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam upaya mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Dengan demikian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo per 3 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021**

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi
1	Bangunan Kantor	unit	3	baik
2	Meja Kerja	buah	36	baik
3	Meja Rapat	buah	18	baik
4	Kursi Kerja	buah	13	baik
5	Kursi Rapat	buah	597	baik
6	Kursi Hadap	buah	4	baik
7	Kursi Besi	buah	20	baik
8	Kursi Putar	buah	19	baik

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi
9	Filling Kabinet	buah	10	baik
10	Lemari Besi	buah	6	baik
11	Lemari Kayu	buah	18	baik
12	Brankas	buah	2	baik
13	AC	unit	38	baik
14	Televisi	buah	3	baik
15	Personal Computer (PC)	unit	21	baik
16	Printer	buah	29	baik
17	Laptop/Note book	buah	44	baik
18	Scanner	buah	2	baik
19	Mesin Penghancur Kertas	buah	2	baik
20	Tabung Pemadam Kebakaran	buah	12	baik
21	Tangga Lipat	buah	2	baik
22	Kamera Digital	buah	6	baik
23	LCD Proyektor	buah	3	baik
24	Sound System	unit	3	baik
25	CCTV	unit	7	baik
26	Mobil/Station Wagon	buah	9	baik
27	Pick Up	buah	1	baik
28	Ambulance	buah	2	baik
29	Sepeda Motor	buah	6	baik

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa semua sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo semua dalam kondisi baik. Diharapkan dengan kondisi sarana prasarana tersebut kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya.

Tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penurunan jumlah penduduk miskin				1,93%	1,90%	1,87%	2,23%	1,81%	1,93%	1,89%	1,83%	2,23%		99,84%	99,47%	97,86%	100,00%	
2	Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya				45,88%	60%	60%	87%		45,88%	60%	60%	81%		100,00%	100,00%	100,00%	93,10%	
3	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				50,01%	55,10%	60,60%	100%		50,01%	55,10%	60,60%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase Tuna Sosial yang terlayani				20,25%	17,92%	17,92%	100%		20,25%	17,92%	17,92%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5	Persentase Disabilitas yang terlayani				0,77%	3,09%	2,90%	100%		0,77%	3,09%	2,90%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani				20,12%	47,06%	47,08	100%		20,12%	47,06%	47,08	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7	Persentase 5 PMKS yang terlayani				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase korban bencana alam yang tertangani				41%	100%	90%	100%		41%	100%	90%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Prosentase korban bencana sosial yang tertangani				100%	100%	80%	100%		100%	100%	80%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Persentase pasien covid yang tertangani kebutuhan permakannya							100%					100%					100,00%	
11	Persentase penduduk miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				44%	80%	80%	70%		44%	80%	80%	70%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
12	Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	80%	85%		96,44%	96,44%	80%	85%		96,44%	96,44%	100,00%	100,00%	
13	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi				100%	100%				92%	92%				92,00%	92,00%			
14	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu				100%	100%				100%	100%				100,00%	100,00%			

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

1. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Secara agregat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Sidoarjo pada tahun 2017 sebesar 1,93 persen turun menjadi 1,83 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan hingga angka 2,23 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19*. Kenaikan persentase jumlah penduduk miskin juga dialami oleh Provinsi Jawa Timur dan bahkan seluruh dunia. Namun demikian, kinerja Dinas Sosial dalam menekan angka kemiskinan juga masih harus ditingkatkan lagi. Karena selama kurun waktu tahun 2016-2020 kinerja Dinas Sosial dalam hal pengentasan kemiskinan masih berada di bawah 100 persen.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya

Sebagai upaya untuk mengukur capaian kinerja pada program ini telah ditentukan 2 (dua) indikator kinerja yaitu, a) Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya; b) Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada kurun waktu tahun 2017-2020 capaian kinerja program ini sangat baik yaitu 100 persen.

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini terdiri atas: a) Persentase Tuna Sosial yang terlayani; b) Persentase Disabilitas yang terlayani; c) Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani; d) Persentase 5 PMKS yang terlayani. Capaian kinerja selama periode Renstra sebelumnya pada program ini mencapai 100 persen. Artinya program ini berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ketiga ini memiliki 3 (tiga) indikator untuk mengukur capaian kinerjanya. Indikator tersebut adalah: a) Persentase korban bencana alam yang tertangani; b) Prosentase korban bencana sosial yang tertangani; c) Persentase penduduk miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Capaian kinerja dalam program Linjamsos ini sangat baik, yaitu mencapai 100 persen. Pada tahun 2020 terdapat kegiatan baru pada program ini yaitu pasien Covid-19 yang tertangani kebutuhan permakannya. Program ini dibuat dalam rangka memberi bantuan permakanan pada pasien yang positif *Covid-19* dan Orang dalam Pantauan (ODP) *Covid-19*.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator untuk program ini adalah Tingkat Kepuasan Aparatur OPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program yang dibawah oleh sekretariat ini pada tahun 2017 dan 2018 kinerjanya berada di bawah 100 persen, yaitu 96,44 persen. Namun meningkat kinerjanya menjadi 100 persen pada tahun 2019 dan 2020.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program kesekretariatan kedua ini memiliki indikator kinerja Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi sebagai basis pengukuran kinerjanya. Capaian program ini dalam masih 92 persen. Artinya masih perlu peningkatan kinerja dalam program ini dalam menunjang kinerja ASN di lingkungan Dinas Sosial untuk terciptanya pelayanan di bidang urusan sosial yang lebih baik lagi ke depan.

Secara garis besar program kegiatan Dinas Sosial Sidoarjo tahun 2017-2021 antara lain: 1) Program Pelayanan Kesekretariatan; 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 3) Program

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program Pelayanan Kesekretariatan rata-rata pertumbuhan anggarannya sebesar 21 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 19 persen. Serapan dalam program pelayanan kesekretariatan di tiap tahunnya berkisar 80-85 persen dari pagu yang ditetapkan.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya rata-rata pertumbuhan anggaran serta realisasinya sebesar 80 persen. Kinerja serapan anggaran dalam program ini cukup baik, yaitu berkisar 90 persen dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terjadi kenaikan anggaran rata-rata 5 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 2 persen di tiap tahunnya dengan serapan rata-rata 85% per tahun. Dan yang terakhir Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran 48 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 52 persen per tahun.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Kesekretariatan	*	1.599.620.000	1.686.390.000	2.445.197.178	2.762.567.019	*	1.354.025.641	1.433.409.949	2.069.255.347	2.208.948.931	*	85%	85%	85%	80%	16%	15%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		670.805.000	1.142.459.900				608.737.650	1.064.899.350				91%	93%				
Program peningkatan disiplin aparatur			12.540.000					12.540.000					100%				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		85.000.000	127.692.000				74.157.000	124.738.000				87%	98%			33%	37%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			939.966.700	5.142.234.065	23.038.015.650			898.018.240	4.413.116.675	21.770.747.375			96%	86%	94%	80%	80%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		7.509.130.650	2.154.752.000	2.132.624.590	2.418.731.200		7.008.547.053	1.941.991.977	1.819.771.190	2.049.092.697		93%	90%	85%	85%	-79%	-84%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			302.606.000	312.966.750	4.882.311.340			257.427.700	300.441.043	4.836.554.920			85%	96%	99%	48%	52%

Keterangan:

*) Dinas Sosial pada tahun 2016 masih tergabung dengan Dinas Ketenagakerjaan.

24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

2.4.1 Tantangan

Tantangan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 5 (lima) tahun ke depan semakin kompleks. Mengingat pandemi *Covid-19* berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan. Situasi ini tentu saja membutuhkan inovasi kebijakan di bidang sosial guna merespon dan mengatasi terciptanya kesenjangan sosial baru di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil analisis terhadap telaah Renstra Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan terdapat 5 (lima) tantangan utama serta permasalahan yang akan dihadapi, yaitu: (1) memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat; (2) memastikan kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi; (3) memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan sosial; (4) kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial; (5) penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial; dan (6) pembiayaan dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Maka dapat disimpulkan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti human trafficking, pekerja migrant bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS, permasalahan sosial lintas provinsi/daerah dan lain lain;
- b. Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial;
- c. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi

politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial,

- d. Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan kumpulan dari hal-hal yang berpotensi sebagai faktor penunjang keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Jawa Timur antara lain yaitu

- a. Dukungan peraturan dan perundang - undangan sebagai penjunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan;
- c. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
- d. Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo berpeluang adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial. Selain itu Akan segera diresmikannya Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) sebagai tempat pelayanan dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah sosial. Terdapat berbagai lembaga-lembaga sosial yang dapat diperbantukan oleh Dinas sosial dan Tenaga Kerja. Lembaga-lembaga sosial tersebut salah satu upaya dalam penanganan masalah rehabilitasi terhadap PMKS, salah satu bentuknya yaitu pendidikan moral, pelatihan keterampilan kerja untuk PMKS.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Maka dari itu analisis isu strategis menjadi bagian penting yang tidak boleh ditinggalkan saat menyusun rencana strategis perangkat daerah. Akurasi dalam penentuan isu strategis akan berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan Dinas Sosial dalam menjalankan program dan kegiatan di bidang sosial.

Pada menentukan isu strategis, hal yang perlu dilakukan sebelumnya adalah identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Sosial beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah tabel identifikasi permasalahan pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Jumlah PPKS yang terus mengalami peningkatan	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS	Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PPKS
		Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS	Belum ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan <i>stakeholder</i> sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal penanganan PPKS.
2	Masih banyaknya fakir miskin yang belum mendapatkan program perlindungan dan jaminan social	Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan	Tata kelola program perlindungan dan jaminan social masih lemah
3	Masih terdapat kesalahan data pada DTKS Kabupaten Sidoarjo	lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis <i>by name by address</i> lintas Perangkat Daerah (PD).	Komunikasi dan koordinasi lintas sector (PD) yang belum berjalan lancar dan massif.
4	Program penanganan kemiskinan (PPKS) masih berjalan parsial	Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain	Sinergi antar perangkat daerah dalam hal penanganan kemiskinan (PPKS) masih lemah
5	Belum optimalnya penanganan dampak sosial bencana	Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih lemah	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM masih terbatas.

Sumber: Dinas Sosial, diolah

3.2 Telaah Visi, Misi, serta Program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Terpilih

Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi sehingga menjadi lebih operasional untuk diimplementasikan dalam program pembangunan. Pokok-pokok visi tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	<i>Sidoarjo Maju</i>	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
		Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	<i>Sidoarjo Berkarakter</i>	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	<i>Pembangunan Berkelanjutan</i>	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi

Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	<i>Sidoarjo Maju</i>	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	<i>Sidoarjo Berkarakter</i>	Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	<i>Pembangunan Berkelanjutan</i>	Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di atas maka misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah Misi ke-2, yaitu:

"Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan"

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan			
	Sidoarjo Sejahtera: Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya.			
1	Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS	Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PPKS	Meningkatnya PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

VISI: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS	Belum ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan <i>stakeholder</i> sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal penanganan PPKS.	Meningkatnya PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3		Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan	Tata kelola program perlindungan dan jaminan social masih lemah	Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui K/L terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
		lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis <i>by name by address</i> lintas Perangkat Daerah (PD).	Komunikasi dan koordinasi lintas sector (PD) yang belum berjalan lancar dan massif.	- UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin - Permensos Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS
		Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain	Sinergi antar perangkat daerah dalam hal penanganan kemiskinan (PPKS) masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan

VISI: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih lemah	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM masih terbatas.	Banyaknya acara-acara bimtek atau pelatihan dalam rangka mitigasi dan penanganan dampak sosial kebencanaan.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunannya juga berpedoman pada Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dalam merumuskan isu-isu strategis, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melakukan telaah atas Renstra Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jatim. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan penyesuaian target kinerja sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo senantiasa linear dengan lembaga vertikal di atasnya. Dengan demikian, setiap capaian kinerja atas program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo akan turut mendukung capaian kinerja di Dinas Sosial Provinsi Jatim dan Kementerian Sosial.

Telaah Rencana Strategis Kementerian Sosial

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024, Kementerian telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.5 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS	Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PPKS	Meningkatnya PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS	Belum ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan <i>stakeholder</i> sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal penanganan PPKS.	Meningkatnya PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS	Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PPKS	Meningkatnya PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Iemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis <i>by name by address</i> lintas Perangkat Daerah (PD).	Komunikasi dan koordinasi lintas sector (PD) yang belum berjalan lancar dan massif.	- UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin - Permensos Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS

Target sasaran strategis 1 mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (vulnerable) seperti PPKS. Dalam Renstra Dinas

Sosial Kabupaten Sidoarjo hal tersebut juga menjadi salah satu permasalahan utama yang akan diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan pada target sasaran strategis 2 yang pertama adalah Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/ lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong stakeholders lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Selaras dengan sasaran strategis ke-2 Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga sedang berupaya meningkatkan layanan terhadap PPKS oleh pekerja sosial melalui peningkatan kapasitas dan cakupan layanan serta perbaikan data DTKS yang terus dilakukan secara berkala.

Telaah Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jatim 2019-2024

Dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sasaran strategis, yaitu:

Tabel 3.6 Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS	Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PPKS	Meningkatnya PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			

Secara substantif kedua sasaran strategis ini telah direpresentasikan

oleh sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Bahkan secara linear mampu terjawab dengan tegas. Saat Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), maka renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga berfokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PPKS melalui optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 menyebutkan bahwa visi penataan wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang secara berangsur akan diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Apabila dihubungkan dengan tupoksi dari masing-masing Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki keterkaitan tupoksi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial pada Kementerian Sosial, Dinas Sosial pada level Provinsi Jawa Timur dan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo disusun untuk pembenahan dan dipertahankan.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang sudah dilakukan, terdapat beberapa isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu antara lain :

- a. Jumlah PPKS yang terus mengalami peningkatan,
- b. Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan,
- c. Masih diperlukan validasi dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis *by name by address* lintas Perangkat Daerah (PD).

Beberapa isu strategis yang berhasil diidentifikasi kemudian diberikan skoring. Tabel di bawah ini akan mengupas secara detail pemetaan kriteria isu-isu strategis sebagai skoring dari isu-isu strategi.

Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria *)	Bobot **)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan terhadap beberapa isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Nilai Skor Kriteria Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS	20	10	20	10	10	20	90
2	Belum ada program terpadu	20	10	20	10	10	15	85

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
	antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PPKS							
3	Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan	20	10	20	10	10	25	95
4	lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis <i>by name by address</i> lintas Perangkat Daerah (PD).	20	10	20	10	8	25	93
5	Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain	10	10	10	10	10	25	75
6	Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih lemah	10	10	10	10	10	20	70

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan telaah analisis permasalahan dan tingkat prioritas, isu strategis Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo adalah:

- a. Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan,
- b. Lemahnya validitas dan keterpaduan data kemiskinan secara dinamis *by name by address* lintas Perangkat Daerah (PD).
- c. Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PPKS
- d. Belum ada program terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat terkait penanganan PMK
- e. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain
- f. Kapasitas SDM penanganan dampak sosial bencana masih perlu ditingkatkan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, disebutkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial . Secara teknokratik, penentuan tujuan dan sasaran renstra mengacu pada urusan yang diampu dan diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Mengacu pada uraian tersebut, maka peta konsep mengenai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial sebagaimana disajikan dalam gambar sebagai berikut;

Gambar 4.1 Konsep Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan gambar konsep perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial sebagaimana telah disajikan di atas, maka diketahui bahwa Dinas Sosial mengemban amanat Misi 2 RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, yaitu “**Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan**”. Selanjutnya dari Misi ke-2 tersebut Dinas Sosial mengampu tujuan yang ke-2 yaitu “**Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan**”, yang diukur dengan Indikator Tujuan RPJMD **Persentase Penduduk**

Miskin.

Mengacu Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, maka ditetapkan **Tujuan Renstra** Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah “**Peningkatan Kesejahteraan Sosial**” dengan indikator **Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan**. Tujuan tersebut memiliki satu **Sasaran Renstra**, yaitu “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS**” dengan indikator **Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pelayanan**.

Apabila disajikan dalam bentuk table, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATU AN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					20 22	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial		Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	Persen	94	94,60	94,70	94,80	95
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan	Persen	80	85	90	95	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Sosial mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi RPJMD: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Misi Ke-2 RPJMD: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kesejahteraan Pemerlu	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kualitas program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Penanganan fakir miskin dan Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan social, Pengembangan

Visi RPJMD:**Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan****Misi Ke-2 RPJMD:****Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kemampuan pekerja sosial dalam pelayanan terhadap PPKS.▪ Menggali dan memberdayakan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<p>Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial bagi PPKS di dalam panti</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Strategi dan Arah Kebijakan di atas, selanjutnya menjadi acuan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk Menyusun prioritas tahunan dalam Rencana Kerja di tahun berkenaan.

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021– 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada Dinas Sosial, ada 6 (Enam) Program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Tahun 2022-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
Peningkatan Kesejahteraan Sosial				Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	94,41%	94%		94,60 %		94,70 %		94,80 %		95%		95%				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS			Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan		80%		85%		90%		95%		100%		100%				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS						Rp36.164.062.991		Rp 79.976.980.903		Rp 85.777.357.308		Rp 92.227.642.393		Rp 98.941.480.335		Rp 98.941.480.335		Dinas Sosial	
			1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	60%	Rp 2.837.427.195	60%	Rp 5.609.182.254	60%	Rp 6.126.900.478	60%	Rp 6.804.390.524	60%	Rp 7.430.829.575	60%	Rp 7.430.829.575			
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin/rekomendasi yang dikeluarkan		353 Rekomendasi	Rp -	353 Rekomendasi	Rp 420.508.733	353 Rekomendasi	Rp 462.559.606	353 Rekomendasi	Rp 508.815.566	353 Rekomendasi	Rp 559.697.122	353 Rekomendasi	Rp 559.697.122			

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi tentang Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		4 Kali		4 Kali	Rp 420.508.733	4 Kali	Rp 462.559.606	4 Kali	Rp 508.815.566	4 Kali	Rp 559.697.122	4 Kali	Rp 559.697.122		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	6 PSKS	6 PSKS	Rp 2.837.427.195	6 PSKS	Rp 5.188.673.521	6 PSKS	Rp 5.664.340.872	6 PSKS	Rp 6.295.574.958	6 PSKS	Rp 6.871.132.453	6 PSKS	Rp 6.871.132.453		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang dibina	100 PSM	100 PSM	Rp 72.000.000	100 PSM	Rp 316.800.000	100 PSM	Rp 348.480.000	100 PSM	Rp 383.328.000	100 PSM	Rp 421.660.800	100 PSM	Rp 421.660.800		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah TKSK yang dibina	18 TKSK	18 TKSK	Rp 432.000.0 00	18 TKSK	Rp 432.000.000	18 TKSK	Rp 432.000.000	18 TKSK	Rp 540.000.000	18 TKSK	Rp 540.000.000	18 TKSK	Rp 540.000.000				
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah PSKS keluarga yang dibina																	

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang dibangun	4 PSKS Kelembagaan	4 PSKS Kelembagaan	Rp 2.314.126.505	4 PSKS Kelembagaan	Rp 3.675.151.867	4 PSKS Kelembagaan	Rp 4.042.667.053	4 PSKS Kelembagaan	Rp 4.446.933.758	4 PSKS Kelembagaan	Rp 4.891.627.133	4 PSKS Kelembagaan	Rp 4.891.627.133		
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibangun	1 LK3	1 LK3	Rp 19.300.690	1 LK3	Rp 764.721.654	1 LK3	Rp 841.193.819	1 LK3	Rp 925.313.200	1 LK3	Rp 1.017.844.520	1 LK3	Rp 1.017.844.520		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			2. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik	100%	100%	Rp 203.464.450	100%	Rp 672.794.800	100%	Rp 597.794.800	100%	Rp 522.794.800	100%	Rp 347.794.800	100%	Rp 347.794.800		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	1 TMP	Rp 203.464.450	1 TMP	Rp 672.794.800	1 TMP	Rp 597.794.800	1 TMP	Rp 522.794.800	1 TMP	Rp 347.794.800	1 TMP	Rp 347.794.800		
			Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana yang Direhabilitasi (5 Unit)			Rp -	2 Unit	Rp 400.000.000	2 Unit	Rp 300.000.000	2 Unit	Rp 200.000.000		Rp -	2 Unit	Rp -		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	1 TMP	Rp 132.110.850	1 TMP	Rp 200.000.000	1 TMP	Rp 225.000.000	1 TMP	Rp 250.000.000	1 TMP	Rp 275.000.000	1 TMP	Rp 275.000.000		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Keamanan Taman Makam Pahlawan yang terbayar	2 Orang	2 Orang	Rp 71.353.600	2 Orang	Rp 72.794.800	2 Orang	Rp 72.794.800								
			3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Prioritas yang Terlayani	58,51%	59,51 %	Rp 8.217.123,692	60,51 %	Rp 15.424.155,812	61,51 %	Rp 16.961.571,394	62,51 %	Rp 18.651.728,501	63,51 %	Rp 20.509.901,383	63,51 %	Rp 20.509.901,383		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	a. Jumlah PPKS Klien Liponos yang terlayani b. Jumlah lansia terlantar yang terlayani c. Jumlah Penyandang disabilitas yang terlayani d. Jumlah anak terlantar diluar panti yang terlayani	a. 900 orang b. 75 orang c. 88 orang d. 1399 orang	a. 900 orang b. - orang c. 100 orang d. 1599 orang	Rp 6.367.139,084	a. 900 orang b. - orang c. 100 orang d. 1649 orang	Rp 13.421.321,833	a. 900 orang b. - orang c. 100 orang d. 1699 orang	Rp 14.758.454,017	a. 900 orang b. - orang c. 100 orang d. 1749 orang	Rp 16.228.299,397	a. 900 orang b. - orang c. 100 orang d. 1799 orang	Rp 17.844.129,358	a. 900 orang b. - orang c. 100 orang d. 1799 orang	Rp 17.844.129,358		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan permakanan	- 88 Penyandang Disabilitas - 1399 Anak - 900 Klien Liponsos	- 100 Penyandang Disabilitas - 1399 Anak - 1399 Anak	Rp 5.731.095.000	- 105 Penyandang Disabilitas - 1538 Anak - 900 klien Liponsos	Rp 8.902.184.500	- 115 Penyandang Disabilitas - 1691 Anak - 900 klien Liponsos	Rp 9.792.402.950	- 125 Penyandang Disabilitas - 1860 Anak - 900 Klien Liponsos	Rp 10.771.643.245	- 135 Penyandang Disabilitas - 2046 Anak - 900 Klien Liponsos	Rp 11.848.807.569	- 135 Penyandang Disabilitas - 2046 Anak - 900 Klien Liponsos	Rp 11.848.807.569		
			Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat bantuan sandang	- 50 Anak - 75 Lansia	-		100 Anak	Rp 42.047.500	150 Anak	Rp 46.252.250	200 Anak	Rp 50.877.475	250 Anak	Rp 55.965.222	250 Anak	Rp 55.965.222		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10	18			19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu	16 Penyanda ng Disabilita s	- 20 Penya ndang Disabil itas - 15 lansia	Rp 160.925.0 00	- 20 Penya ndang Disabil itas - 15 lansia	Rp 150.000.000	- 20 Penya ndang Disabil itas - 15 lansia	Rp 160.000.000	- 20 Penya ndang Disabil itas - 15 lansia	Rp 170.000.000	- 20 Penya ndang Disabil itas - 15 lansia	Rp 180.000.000	- 20 Penya ndang Disabil itas - 15 lansia	Rp 180.000.000		
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang				

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	900 Klien Liponosos	- 220 Penyandang Disabilitas - 150 Anak	Rp 377.000.000	- 220 Penyandang Disabilitas - 150 Anak	Rp 218.787.085	- 220 Penyandang Disabilitas - 150 Anak	Rp 240.665.793	- 220 Penyandang Disabilitas - 150 Anak	Rp 264.732.372	- 220 Penyandang Disabilitas - 150 Anak	Rp 291.205.610	- 220 Penyandang Disabilitas - 150 Anak	Rp 291.205.610		
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gepeng terlantar mendapat bimbingan sosial	- 50 Orang Tua Anak Terlantar - 88 Keluarga Disabilitas	100 Keluar Rp 17.305.000	105 Keluar Rp 22.110.000	115 Keluar Rp 24.321.000	125 Keluar Rp 26.753.100	135 Keluar Rp 29.428.410	135 Keluar Rp 29.428.410								

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi										
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)													
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28										
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar yang terlayani		25	Orang	25	Orang	25	Orang	25	Orang	25	Orang	25	Orang												
			Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	50 Rekomendasi	50	Rekomendasi	50	Rekomendasi	50	Rekomendasi	50	Rekomendasi	50	Rekomendasi	50	Rekomendasi												
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	60 Pengaduan	60	Pengaduan	80.814.084	Rp	65	Pengaduan	80.524.790	Rp	70	Pengaduan	88.577.270	Rp	75	Pengaduan	97.434.997	Rp	80	Pengaduan	107.178.497	Rp	80	Pengaduan	107.178.497	Rp
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah respon layanan kedaruratan	36 Respon	36	Respon			36	Respon			36	Respon			36	Respon			36	Respon			36	Respon		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia terlantar, Gepeng di luar panti yang mendapat layanan penelusuran keluarga	60 Penelusu ran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran	60 Penelu suran				
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia terlantar, Gepeng di luar panti yang mendapat layanan rujukan	6 Rujukan	6 Rujuka n	7 Rujuka n	8 Rujuka n	9 Rujuka n	10 Rujuka n	10 Rujuka n	10 Rujuka n	10 Rujuka n	10 Rujuka n	10 Rujuka n				
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan	120 orang	1110 Orang	Rp 1.849.984 .608	310 Orang	Rp 2.002.833.9 79	320 Orang	Rp 2.203.117.3 77	330 Orang	Rp 2.423.429.1 04	340 Orang	Rp 2.665.772.0 25	340 Orang	Rp 2.665.772.0 25		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi										
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)													
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28										
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		24		24	Rp 926.575.120	24		24	Rp 1.019.232.632	24		24	Rp 1.121.155.896	24		24	Rp 1.233.271.485	24		24	Rp 1.233.271.485				
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		900	Rp 861.824.663	24	layanan	24	Rp 881.488.459	24	layanan	24	Rp 969.637.305	24	layanan	24	Rp 1.066.601.033	24	layanan	24	Rp 1.173.261.139	24	layanan	24	Rp 1.173.261.139		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10	18			19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
				Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS lainnya diluar panti yang mendapat bantuan permakanan	20 Orang Eks Psikotik/ ODGJ	900 Klien Lipons os	Rp 773.481.1 45	50 orang	Rp 36.562.900	60 orang	Rp 40.219.190	70 Orang	Rp 44.241.100	80 Orang	Rp 48.665.219	80 Orang	Rp 48.665.219		
				Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sandang	-	- 10 Remaja	Rp 51.593.80 0	- 10 Remaja	Terlant ar - 25 pemul ung	- 10 Remaja	Terlant ar - 30 pemul ung	- 10 Remaja	Terlant ar - 30 pemul ung	- 10 Remaja	Terlant ar - 30 pemul ung	- 10 Remaja	Terlant ar - 30 pemul ung		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan perbekalan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan perbekalan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya diluar panti yang mendapat bimbingan	100 Orang ODHA	- 200 Tuna Susila - 20 PMKS - 900 Klien Liponsos	Rp 163.085.000	- 200 Tuna Susila - 20 PMKS	Rp 158.207.500	- 200 Tuna Susila - 20 PMKS	Rp 174.028.250	- 200 Tuna Susila - 20 PMKS	Rp 191.431.075	- 200 Tuna Susila - 20 PMKS	Rp 210.574.182	- 200 Tuna Susila - 20 PMKS	Rp 210.574.182		
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang			

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10	18			19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang		24 orang			
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		-		-		-		-		-		-			

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Deinstr Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan		-		-		-		-		-		-		-		
			5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	94%	97,00 %	Rp15.788.837.570	97,50 %	Rp 43.506.345.423	98,00 %	Rp 45.852.807.759	98,50 %	Rp 48.383.680.404	99,00 %	Rp 51.007.392.596	99%	Rp 51.007.392.596			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1.843.053 Jiwa	1.843.053 Jiwa	Rp15.788.837.570	1.843.053 Jiwa	Rp 43.506.345.423	1.843.053 Jiwa	Rp 45.852.807.759	1.843.053 Jiwa	Rp 48.383.680.404	1.843.053 Jiwa	Rp 51.007.392.596	1.843.053 Jiwa	Rp 51.007.392.596			
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi b. Jumlah Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data PKH yang Dilaksanakan	a. 353 Desa/Kelurahan b. 4 Kali	a. 353 Desa/Kelurahan b. 4 Kali	Rp 1.923.968.050	a. 353 Desa/Kelurahan b. 4 Kali	Rp 2.717.033.682	a. 353 Desa/Kelurahan b. 4 Kali	Rp 2.988.737.051	a. 353 Desa/Kelurahan b. 4 Kali	Rp 3.287.610.755	a. 353 Desa/Kelurahan b. 4 Kali	Rp 3.616.371.830	a. 353 Desa/Kelurahan b. 4 Kali	Rp 3.616.371.830			

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase KPM PKH yang memenuhi persyaratan sebagai KPM PKH b. Persentase KPM BPNT yang memenuhi persyaratan sebagai KPM BPNT c. Persentase KPM Bantuan Sosial Lainnya yang Memenuhi Persyaratan		a. 80% b. 80% c. 80%	Rp 44.537.600	a. 85% b. 85% c. 85%	Rp 44.537.600	a. 90% b. 90% c. 90%	Rp 44.537.600	a. 95% b. 95% c. 95%	Rp 44.537.600	a. 100% b. 100% c. 100%	Rp 44.537.600	a. 100% b. 100% c. 100%	Rp 44.537.600		
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	a. Jumlah penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin b. Jumlah fakir miskin penerima Bantuan Sosial Pangan	a. 6000 KPM b. 6000 KPM	a. 730 KPM b. 2.700 KPM	Rp13.299.000.950	a. 1460 KPM b. 5000 KPM	Rp 40.044.368.941	a. 2190 KPM b. 5000 KPM	Rp 42.049.087.388	a. 2920 KPM b. 5000 KPM	Rp 44.204.041.757	a. 3650 KPM b. 5000 KPM	Rp 46.414.243.845	a. 3650 KPM b. 5000 KPM	Rp 46.414.243.845		
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	a. Jumlah Warga Miskin yang Dilatih b. Jumlah KUBE yang Terbentuk c. Jumlah KUBE yang memperoleh Akses Permodalan d. Jumlah KUBE yang Dimonev	a. 360 Orang b. 18 KUBE c. 18 KUBE d. 18 KUBE	a. 360 Orang b. 18 KUBE c. 18 KUBE d. 18 KUBE	Rp 521.330.970	a. 360 Orang b. 18 KUBE c. 18 KUBE d. 36 KUBE	Rp 700.405.200	a. 360 Orang b. 18 KUBE c. 18 KUBE d. 72 KUBE	Rp 770.445.720	a. 360 Orang b. 18 KUBE c. 18 KUBE d. 90 KUBE	Rp 847.490.292	a. 360 Orang b. 18 KUBE c. 18 KUBE d. 118 KUBE	Rp 932.239.321	a. 360 Orang b. 18 KUBE c. 18 KUBE d. 118 KUBE	Rp 932.239.321		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%	Rp 597.630.590	100%	Rp 4.009.673.329	100%	Rp 4.407.970.663	100%	Rp 4.851.704.729	100%	Rp 5.336.875.202	100%	Rp 5.336.875.202		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 3.413.507.825	100%	Rp 3.754.858.608	100%	Rp 4.130.344.469	100%	Rp 4.543.378.916	100%	Rp 4.543.378.916		
			Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan permakanan		1000 Orang	Rp 200.000.000	1000 Orang	Rp 2.669.231.576	1000 Orang	Rp 2.936.154.734	1000 Orang	Rp 3.229.770.207	1000 Orang	Rp 3.552.747.228	1000 Orang	Rp 3.552.747.228		
			Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang															
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki				1 Tempat	Rp 545.694.899	1 Tempat	Rp 600.264.389	1 Tempat	Rp 660.290.828	1 Tempat	Rp 726.319.911	1 Tempat	Rp 726.319.911		
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan				100%	Rp 198.581.350	100%	Rp 218.439.485	100%	Rp 240.283.434	100%	Rp 264.311.777	100%	Rp 264.311.777		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan Psikososial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang Dibina	50 Orang	50 Orang	Rp 397.630.590	50 Orang	Rp 596.165.504	50 Orang	Rp 653.112.055	50 Orang	Rp 721.360.260	50 Orang	Rp 793.496.286	50 Orang	Rp 793.496.286			
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang menerima sosialisasi kebencanaan		100 Orang	Rp 30.000.000	100 Orang	Rp 30.330.000	100 Orang	Rp 36.300.000	100 Orang	Rp 39.930.000	100 Orang	Rp 39.930.000					
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang menerima penguatan SDM	50 Orang	50 Orang	Rp 397.630.590	50 Orang	Rp 566.165.504	50 Orang	Rp 622.782.055	50 Orang	Rp 685.060.260	50 Orang	Rp 753.566.286	50 Orang	Rp 753.566.286			
			7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	Rp 8.519.579.494	90%	Rp 10.754.829.285	90%	Rp 11.830.312.214	90%	Rp 13.013.343.435	90%	Rp 14.308.686.779	90%	Rp 14.308.686.779			

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1. 2 Tahap 2. 4 Rekomendasi	1. 2 Tahap 2. 4 Rekomendasi	Rp 25.540.000	1. 2 Tahap 2. 4 Rekomendasi	Rp 158.534.750	1. 2 Tahap 2. 4 Rekomendasi	Rp 174.388.225	1. 2 Tahap 2. 4 Rekomendasi	Rp 191.827.047	1. 2 Tahap 2. 4 Rekomendasi	Rp 211.009.752	1. 2 Tahap 2. 4 Rekomendasi	Rp 211.009.752		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 15.200.000	2 Dokumen	Rp 140.222.720	2 Dokumen	Rp 154.244.992	2 Dokumen	Rp 169.669.491	2 Dokumen	Rp 186.636.440	2 Dokumen	Rp 186.636.440		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu		1 Dokumen	Rp 605.000	1 Dokumen	Rp 1.311.860	1 Dokumen	Rp 1.443.046	1 Dokumen	Rp 1.587.351	1 Dokumen	Rp 1.746.086	1 Dokumen	Rp 1.746.086		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu		1 Dokumen	Rp 1.540.000	3 Dokumen	Rp 3.176.492	3 Dokumen	Rp 3.494.141	3 Dokumen	Rp 3.843.555	3 Dokumen	Rp 4.227.911	3 Dokumen	Rp 4.227.911		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.860.000	1 Dokumen	Rp 4.438.720	1 Dokumen	Rp 4.882.592	1 Dokumen	Rp 5.370.851	1 Dokumen	Rp 5.907.936	1 Dokumen	Rp 5.907.936		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.200.000	3 Dokumen	Rp 3.712.720	3 Dokumen	Rp 4.083.992	3 Dokumen	Rp 4.492.391	3 Dokumen	Rp 4.941.630	3 Dokumen	Rp 4.941.630		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.135.000	4 Dokumen	Rp 5.672.238	4 Dokumen	Rp 6.239.462	4 Dokumen	Rp 6.863.408	4 Dokumen	Rp 7.549.749	4 Dokumen	Rp 7.549.749			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	80%	80%	Rp 5.808.943.832	83%	Rp 6.291.618.819	83%	Rp 6.920.780.701	83%	Rp 7.612.858.771	83%	Rp 8.374.144.648	83%	Rp 8.374.144.648			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	396 Orang	12 bulan	Rp 5.806.358.832	12 bulan	Rp 6.288.034.073	12 bulan	Rp 6.916.837.480	12 bulan	Rp 7.608.521.228	12 bulan	Rp 8.369.373.351	12 bulan	Rp 8.369.373.351			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia																
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan		315 SPM		315 SPM		315 SPM		315 SPM		315 SPM		315 SPM				

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan penatausahaan akuntansi keuangan PD yang di susun															
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.585.000	1 Laporan	Rp 3.584.746	1 Laporan	Rp 3.943.221	1 Laporan	Rp 4.337.543	1 Laporan	Rp 4.771.297	1 Laporan	Rp 4.771.297		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun															
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90%	90%	Rp 753.705.047	90%	Rp 1.328.331.267	90%	Rp 1.461.164.395	90%	Rp 1.607.280.835	90%	Rp 1.768.008.919	90%	Rp 1.768.008.919		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	5 Komponen	119 buah	Rp 6.750.596	119 buah	Rp 13.151.147	119 buah	Rp 14.466.262	119 buah	Rp 15.912.888	119 buah	Rp 17.504.177	119 buah	Rp 17.504.177		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	27 Macam	602 buah	Rp 31.555.304	602 buah	Rp 37.179.495	602 buah	Rp 40.897.445	602 buah	Rp 44.987.190	602 buah	Rp 49.485.909	602 buah	Rp 49.485.909		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia															
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	22380 Liter	31800 Liter	Rp 318.600.000	37000 Liter	Rp 370.260.000	40000 Liter	Rp 407.286.000	44000 Liter	Rp 448.014.600	49000 Liter	Rp 492.816.060	49000 Liter	Rp 492.816.060		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	450 Buah	400 buah		400 buah		400 buah		400 buah		400 buah		400 buah			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	2 Jenis	4 Jenis	Rp 7.481.760	4 Jenis	Rp 8.910.000	4 Jenis	Rp 9.801.000	4 Jenis	Rp 10.781.100	4 Jenis	Rp 11.859.210	4 Jenis	Rp 11.859.210		
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia															

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Fasilitasi Kunjungan TamU	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1. 465 Kotak 2. 465 Orang	1. 375 Kotak 2. 275 Orang	Rp 15.562.50 0	1. 465 Kotak 2. 465 Orang	Rp 18.830.625	1. 465 Kotak 2. 465 Orang	Rp 20.713.688	1. 465 Kotak 2. 465 Orang	Rp 22.785.057	1. 465 Kotak 2. 465 Orang	Rp 25.063.563	1. 465 Kotak 2. 465 Orang	Rp 25.063.563		
			Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	100%	100%	Rp 373.754.8 87	100%	Rp 880.000.000	100%	Rp 968.000.000	100%	Rp 1.064.800.0 00	100%	Rp 1.171.280.0 00	100%	Rp 1.171.280.0 00		
			Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola															
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data dan informasi PD yang tersedia															
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	43 Unit	6 Unit	Rp 95.385.40 0	10 Unit	Rp 266.139.918	12 Unit	Rp 292.753.910	14 Unit	Rp 322.029.301	16 Unit	Rp 354.232.231	16 Unit	Rp 354.232.231		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan															

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasiona l yang diadakan																
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan																
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan																
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleurn yang diadakan																
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	14 Jenis	3 Jenis	Rp 95.385.40 0	4 Jenis	Rp 266.139.918	Rp 292.753.910	Rp 322.029.301	Rp 354.232.231	Rp 354.232.231							
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan																
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan																
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan																

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan																
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	100%	Rp 1.151.130.800	100%	Rp 1.332.639.880	100%	Rp 1.465.903.868	100%	Rp 1.612.494.255	100%	Rp 1.773.743.680	100%	Rp 1.773.743.680			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	5500 Surat	5500 Surat	Rp 550.000	6000 Surat	Rp 605.000	6000 Surat	Rp 665.500	6000 Surat	Rp 732.050	6000 Surat	Rp 805.255	6000 Surat	Rp 805.255			

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	Rp 327.500.000	12 Bulan	Rp 360.250.000	12 Bulan	Rp 396.275.000	12 Bulan	Rp 435.902.500	12 Bulan	Rp 479.492.750	12 Bulan	Rp 479.492.750		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik															
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 48 Orang 2. 48 Orang 3. 240 Orang 4. 60 Orang	1. 48 Orang 2. 48 Orang 3. 240 Orang 4. 60 Orang	Rp 823.080.800	1. 48 Orang 2. 48 Orang 3. 240 Orang 4. 60 Orang	Rp 971.784.880	1. 48 Orang 2. 48 Orang 3. 240 Orang 4. 60 Orang	Rp 1.068.963.368	1. 48 Orang 2. 48 Orang 3. 240 Orang 4. 60 Orang	Rp 1.175.859.705	1. 48 Orang 2. 48 Orang 3. 240 Orang 4. 60 Orang	Rp 1.293.445.675	1. 48 Orang 2. 48 Orang 3. 240 Orang 4. 60 Orang	Rp 1.293.445.675		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	165 Unit	170 Unit	Rp 684.874.415	170 Unit	Rp 1.377.564.651	170 Unit	Rp 1.515.321.115	170 Unit	Rp 1.666.853.226	170 Unit	Rp 1.827.547.549	170 Unit	Rp 1.827.547.549		

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 18 Unit 2. 3. 18 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 127.500,00 3. 19 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 291.500.000 3. 19 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 320.650.000 3. 19 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 352.715.000 3. 19 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 387.986.500 3. 19 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 3. 19 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 3. 19 STNK	1. 19 Unit 2. Rp 3. 19 STNK							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara b. Jumlah Alat Besar yang diurus perijinannya																

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diurus perijinannya																
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara																
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara																
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara																
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara																
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit	3 Unit	Rp 235.814.430	3 Unit	Rp 743.381.667	3 Unit	Rp 817.719.833	3 Unit	Rp 899.491.816	3 Unit	Rp 989.449.998	3 Unit	Rp 989.449.998			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Jenis	3 unit	Rp 210.929.985	3 unit	Rp 232.682.984	3 unit	Rp 255.951.282	3 unit	Rp 281.546.410	3 unit	Rp 303.701.051	3 unit	Rp 303.701.051			

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	165 Unit	3 unit	Rp 110.630.000	3 unit	Rp 110.000.000	3 unit	Rp 121.000.000	3 unit	Rp 133.100.000	3 unit	Rp 146.410.000	3 unit	Rp 146.410.000		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi															
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat															
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan															
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan															
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah															

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan																
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal																
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan																
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan																
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi																

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun																
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi																
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian																
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD yang dilakukan																
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun																
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu																

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	10		18	19	20	21		22		23		24		25		26		27	28	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik 2. Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan																

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH							
1	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	94,41	94	94,60	94,70	94,80	95	95
II	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH							
2	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan		80	85	90	95	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dalam periode tahun 2021-2026 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun yang sama.

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini dapat berjalan efektif. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Sidoarjo, Agustus 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO
DINAS SOSIAL
DR. TIRTO ADI, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 196605111998021003

